

Analisis Utang Pemerintah terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia 2014-2023

Erico Perdana Kusuma^{1*}, Daryono Soebagiyo², Maulidyah Indira Hasmarini³

Email korespondensi : ericokusuma@gmail.com

^{1*2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis utang pemerintah terhadap kebijakan fiskal di Indonesia 2014-2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah data utang pemerintah (baik utang luar negeri maupun domestik) dan kebijakan fiskal Indonesia yang mencakup pendapatan, belanja, dan defisit anggaran dalam kurun waktu 2014-2023. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan alat uji SPSS. Uji yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik; uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji hipotesis, uji regresi linier berganda, uji f, uji t, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini ialah utang negara memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan fiskal di Indonesia selama periode 2014–2023. Peningkatan utang negara secara signifikan terjadi sebagai bagian dari strategi fiskal ekspansif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel utang negara mampu menjelaskan 97,8% variasi kebijakan fiskal, menegaskan peran penting utang dalam pengelolaan fiskal. Meskipun kebijakan ini membantu menjaga perekonomian selama masa krisis, lonjakan utang menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Kata Kunci: *Kebijakan Fiskal, Utang Pemerintah*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Utang negara saat ini menjadi isu penting bagi masyarakat Indonesia, terutama karena sebagian masyarakat merasa terbebani dengan peningkatan jumlah utang yang terus diberitakan. Hal ini menyoroti kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah (Al Haniva et al., 2023). Seperti yang diungkapkan oleh Turmudi (2019), setiap perubahan dalam pendapatan atau penerimaan negara berdampak pada pengelolaan anggaran pemerintah, yang idealnya harus disesuaikan dengan kapasitas keuangan negara. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ekonomi yaitu kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian suatu negara,

terutama dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan (Junaedi & Arsyad, 2018). Salah satu komponen utama dalam kebijakan fiskal adalah utang pemerintah (Syafi'i et al., 2021). Di Indonesia, utang pemerintah telah menjadi topik yang sering dibahas, terutama dalam konteks perkembangannya dari tahun 2014 hingga 2023. Penambahan utang seringkali menjadi pilihan pemerintah untuk membiayai defisit anggaran, khususnya ketika penerimaan negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja publik (Zahirah et al., 2023).

Selama periode 2014 hingga 2023, perekonomian Indonesia mengalami beberapa guncangan besar, termasuk krisis keuangan global pada 2008-2009, penurunan harga komoditas pada pertengahan 2010-an, serta pandemi COVID-19 pada 2020-2022. Kondisi-kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan fiskal yang ekspansif, salah satunya melalui peningkatan utang (Pertiwi et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana perkembangan utang pemerintah selama periode tersebut dan bagaimana kebijakan fiskal yang ditempuh berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia.

Perkembangan Utang Pemerintah Indonesia 2014-2023. Pada tahun 2008, Indonesia mulai merasakan dampak dari krisis keuangan global yang dipicu oleh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat. Meskipun dampaknya terhadap ekonomi Indonesia tidak sebesar negara-negara maju, pemerintah tetap harus mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, utang pemerintah meningkat sebagai salah satu upaya untuk mendukung belanja infrastruktur dan program-program stimulus ekonomi. Pada tahun 2009, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat sebesar 28,7%. Angka ini relatif moderat jika dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya yang terkena dampak lebih parah oleh krisis global. Kebijakan pemerintah pada saat itu lebih fokus pada pengelolaan defisit anggaran yang tetap terjaga di level yang aman. Namun, penurunan harga komoditas global pada periode 2012-2016 berdampak negatif terhadap pendapatan negara, terutama dari sektor pertambangan, sehingga utang pemerintah kembali meningkat (Aqmarina & Furqon, 2020).

Memasuki periode 2015-2019, pemerintahan Presiden Joko Widodo mengusung agenda besar pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Untuk membiayai program infrastruktur tersebut, utang pemerintah mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Pada akhir tahun 2019, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 4.779 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 30,2%. Kenaikan ini seiring dengan kebutuhan pendanaan proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang

bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kebijakan Fiskal dan Utang Pemerintah Tahun 2020 menjadi titik balik besar dalam pengelolaan kebijakan fiskal Indonesia (Wijayanti, 2023). Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia memaksa pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan darurat, termasuk paket stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan fiskal yang sangat ekspansif. Defisit anggaran diperlebar hingga lebih dari 6% dari PDB, jauh di atas batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara (3%) (Handoko et al., 2023).

Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, pemerintah secara signifikan meningkatkan penarikan utang. Pada tahun 2020, total utang pemerintah melonjak menjadi Rp 6.074 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 38,5%. Meskipun utang ini digunakan untuk keperluan darurat, seperti penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus ekonomi, lonjakan utang dalam waktu yang relatif singkat menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal jangka panjang. Pada tahun 2021 dan 2022, meskipun pandemi mulai terkendali dan perekonomian mulai pulih, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan fiskal yang ekspansif (Lusiana & Soebagiyo, 2023). Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama melalui belanja infrastruktur dan program pemulihan ekonomi nasional. Hingga akhir tahun 2022, total utang pemerintah mencapai Rp 7.000 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB di kisaran 40-42%. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis utang pemerintah terhadap kebijakan fiskal di Indonesia 2014-2023.

Tinjauan Pustaka

Arah Kebijakan Fiskal 2009-2023

Memasuki tahun 2023, pemerintah Indonesia mulai mengalihkan fokus dari kebijakan fiskal darurat (*emergency fiscal measures*) menuju kebijakan yang lebih berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan defisit anggaran kembali ke level di bawah 3% dari PDB, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Namun, tantangan yang dihadapi dalam mencapai target ini cukup besar, terutama mengingat tekanan dari sisi belanja publik yang masih tinggi (Siswajanthry et al., 2024). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui reformasi perpajakan, termasuk peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis pajak, dan penerapan pajak-pajak baru seperti pajak karbon. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dengan meningkatkan

penerbitan obligasi domestik dan mendorong partisipasi investor lokal dalam pasar surat utang negara (Ariski et al., 2024).

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi (Nurlia et al., 2023). Salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian negara adalah kebijakan fiskal, yang bekerja bersamaan dengan kebijakan ekonomi lainnya, seperti kebijakan moneter dan perdagangan (Alfiyati et al., 2024).

Kebijakan fiskal mencakup dua komponen utama: penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu komponen penting dalam kebijakan fiskal adalah pajak. Menurut Adiyanta (2020), pajak memiliki pengaruh besar terhadap kondisi makroekonomi suatu negara. Misalnya, jika tarif pajak diturunkan, maka daya beli masyarakat akan meningkat, dan industri pun akan lebih mampu meningkatkan jumlah output yang dihasilkan. Sebaliknya, jika tarif pajak dinaikkan, daya beli masyarakat akan menurun, dan output industri juga akan terdampak. Ini karena secara alami, individu cenderung mempertimbangkan beban pajak sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi atau berinvestasi (Raysharie et al., 2024).

Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah data utang pemerintah (baik utang luar negeri maupun domestik) dan kebijakan fiskal Indonesia yang mencakup pendapatan, belanja, dan defisit anggaran dalam kurun waktu 2014-2023. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah data tahunan laporan keuangan dari:

- a. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (APBN dan APBN-P).
- b. Bank Indonesia terkait posisi utang pemerintah
- c. Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data penunjang seperti indikator makroekonomi yang relevan
- d. Data utang pemerintah dan indikator kebijakan fiskal yang lengkap selama periode 2014-2023.

Jenis data yang digunakan data sekunder berupa data runtun waktu (*time series*). Untuk sumber datanya adalah Data APBN, APBN-P, dan laporan utang pemerintah, Data utang luar negeri dan indikator ekonomi terkait, Data pendukung seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator lainnya dan Laporan dan publikasi internasional. Teknik

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengukur pertumbuhan ekonomi dengan variabel ekonomi makro. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dengan menggunakan alat uji SPSS (Ghozali, 2018). Uji yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik; uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji hipotesis, uji regresi linier berganda, uji f, uji t, dan uji koefisien determinasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, khususnya residu dari persamaan regresi, mengikuti distribusi normal atau tidak. Dalam hal ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji normalitas melalui Uji Kolmogorov-Smirnov:

Tabel 1. Uji Normalitas

	Nilai Kolmogorov-Smirnov	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,056	Normal

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Tabel 1 menunjukkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pada kolom "Asymp. Sig. (2-tailed)", nilai yang tercatat adalah 0,056. Nilai ini merujuk pada signifikansi uji normalitas, yang digunakan untuk menguji apakah data yang diuji mengikuti distribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, jika nilai signifikansi (Asymp. Sig.) lebih besar dari 0,05, maka data dianggap terdistribusi normal. Karena nilai 0,056 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji memenuhi asumsi normalitas dan terdistribusi normal. Oleh karena itu, berdasarkan hasil uji ini, dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam analisis tersebut mengikuti distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas dilihat berdasarkan Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Berikut ini adalah hasil dari Uji Multikolinieritas yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Total Hutang Negara	1,000	1,000	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Tabel 2 menunjukkan hasil uji multikolinearitas untuk variabel independen "Total Hutang Negara". Pada kolom "Tolerance", nilai yang tercatat adalah 1,000, yang menunjukkan bahwa variabel "Total Hutang Negara" tidak memiliki masalah multikolinearitas dengan variabel independen lainnya, karena nilai tolerance yang tinggi menandakan tidak adanya korelasi yang signifikan antar variabel independen. Selain itu, pada kolom "VIF", nilai yang tercatat juga adalah 1,000. Nilai VIF yang lebih kecil dari 10 mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas yang signifikan antara variabel independen tersebut dengan variabel lainnya dalam model.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas berfungsi untuk mengetahui apakah didalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Hasil dari uji heterokedastisitas telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
Total Hutang Negara	0,374	Homoskedastisitas

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Tabel 3 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas untuk variabel "Total Hutang Negara". Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memeriksa apakah terdapat variabilitas yang tidak konstan atau perubahan varians error dalam model regresi, yang dapat memengaruhi validitas hasil analisis. Pada kolom "Nilai Signifikansi", tercatat nilai 0,374. Nilai ini merujuk pada signifikansi uji heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, yang berarti varians error bersifat konstan.

Uji Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu Hutang Negara (X), berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen, yaitu Kebijakan Fiskal (Y). Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel ANOVA pada kolom sig. (significance). Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05), jika nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_a ditolak. Berikut adalah hasil uji F:

Tabel 4. Hasil Uji F

F Hitung	F Tabel	Sig.	Keterangan
364,091	5,12	0,000	Mempunyai pengaruh bermakna

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Tabel 4 menunjukkan hasil uji F yang digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan, yaitu untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pada kolom "F Hitung", nilai yang tercatat adalah 364,091, yang merupakan nilai statistik F yang dihitung berdasarkan data yang dianalisis. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai "F Tabel" yang tercatat sebesar 5,12. Jadi $364,091 > 5,12$ yang artinya model regresi yang digunakan mempunyai pengaruh bermakna dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Tujuan dari uji t ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh Hutang Negara (X) terhadap variabel dependen, yaitu Kebijakan Fiskal (Y). Berikut adalah hasil uji t :

Tabel 5. Hasil Uji t

Variabel	t Hitung	T Tabel.	Sig.	Keterangan
Hutang Negara	19,081	2,228	0,000	Berpengaruh

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Tabel 5 menunjukkan hasil uji t untuk variabel "Hutang Negara" yang digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Pada kolom "t Hitung", nilai yang tercatat adalah 19,081, yang menunjukkan statistik t yang dihitung berdasarkan data yang dianalisis. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai "t Tabel" yang tercatat sebesar 2,228. Jadi $19,081 > 2,228$ yang artinya Hutang Negara berpengaruh terhadap Kebijakan Fiskal.

Koefisien Determinasi (R²)

Analisis koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dalam bentuk persentase. Nilai R² menggambarkan sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R² berkisar antara nol hingga satu, dan semakin mendekati satu, semakin baik model regresi tersebut. Berikut ini adalah hasil dari analisis uji Koefisien Determinasi (R²):

Tabel 6. Hasil R Square

Variabel	R Square
Kebijakan Fiskal	0,978

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,978 atau 97,8%. Artinya, variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Hutang Negara, dapat menjelaskan 97,8% variasi pada variabel dependen, yaitu Kebijakan Fiskal. Sisa 2,2% variasi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk menganalisis hubungan antara variabel Hutang Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Adapun berdasarkan perhitungan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier

Variabel	B	Std. Error
Konstanta	214,500	148,120
Hutang Negara	0,459	0,024

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

$$Y = 214,500 + 0,459X_1 + e$$

- Nilai konstanta sebesar 214,500 artinya jika variabel lain bernilai konstan maka nilai variabel Y akan naik sebesar 48,522.
- Jika X naik satu satuan dan variabel lain bernilai konstan maka nilai Y akan turun sebesar 0,459.

Pembahasan

Pengaruh Hutang Negara Terhadap Kebijakan Fiskal

Berdasarkan hasil uji t di atas, diperoleh nilai t hitung yang jauh lebih besar dari nilai t tabel, dan nilai signifikansinya sangat kecil (jauh di bawah 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, Hutang Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan Fiskal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hazmi et al. (2019) dan Oktaviana et al. (2024), yang menyatakan bahwa utang pemerintah berpengaruh terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Riblier (2023) juga mengungkapkan bahwa biaya utang publik mempengaruhi kebijakan fiskal dan berdampak pada perekonomian.

Pengaruh utang negara terhadap kebijakan fiskal di Indonesia antara 2014–2023 menunjukkan hubungan yang erat, terutama dalam upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai berbagai program prioritas. Selama periode tersebut, utang pemerintah meningkat signifikan, khususnya dalam konteks kebijakan fiskal ekspansif yang diterapkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, pandemi memaksa pemerintah untuk memperluas defisit anggaran hingga jauh di atas batas aman yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Peningkatan utang pada tahun tersebut digunakan

untuk pembiayaan darurat, seperti penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus ekonomi.

Meski strategi ini membantu menjaga perekonomian tetap berjalan di tengah tekanan global, lonjakan utang yang terjadi menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal jangka panjang. Pada tahun 2023, pemerintah mulai mengalihkan fokus dari kebijakan fiskal darurat menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan, termasuk dengan menurunkan defisit anggaran dan meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan. Selain itu, langkah untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dilakukan dengan mendorong penerbitan obligasi domestik.

Dari hasil analisis regresi dalam penelitian ini, diketahui bahwa utang negara berpengaruh signifikan terhadap kebijakan fiskal, dengan variabel utang negara menjelaskan sebagian besar variasi dalam kebijakan fiskal. Hal ini menegaskan bahwa utang menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan fiskal Indonesia, meskipun perlu diimbangi dengan strategi pengelolaan yang hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, diperoleh temuan bahwa utang negara memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan fiskal di Indonesia selama periode 2014–2023. Peningkatan utang negara terjadi secara signifikan sebagai bagian dari strategi fiskal ekspansif yang diterapkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mengatasi dampak pandemi COVID-19. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel utang negara mampu menjelaskan sebagian besar variasi kebijakan fiskal, yang menegaskan peran penting utang dalam pengelolaan fiskal. Meskipun kebijakan ini membantu menjaga perekonomian selama masa krisis, lonjakan utang menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Adiyanta, F. S. (2020). *Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pada Pandemi Covid-19*. *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 162-181, Mar. 2020. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181>
- Al Haniva, S., Awalunnisa, Y., Putri, T. D., & Damayanti, T. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Kebijakan Fiskal di Provinsi Banten. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 128–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v1i1.17>
- Alfiyati, M., Laila, A. N., & Amalia, F. (2024). Peran Kebijakan Fiskal dalam Menstabilkan Ekonomi Selama Krisis Ekonomi Global: Studi Kasus di Indonesia pasca Covid-19. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 11(1).
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 263, 2621–4636. <https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2507>
- Ariski, F., Usman, M., & Ambya, A. (2024). Dampak Utang Pemerintah Terhadap Konsumsi Masyarakat di Indonesia dalam Perspektif Ricardian Equivalence Hypothesis. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 669–677. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1236>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, D. O., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 12–20.
- Hazmi, Y., Faisal, Cahyani, I., & Yetty, T. P. (2019). Akumulasi Utang Pemerintah, Subsidi Dan Keberlanjutan Fiskal Di Indonesia. *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 77–82.
- Junaedi, D., & Arsyad, M. R. (2018). Analisis Pengaruh Utang terhadap Perekonomian dan Kemiskinan di Indonesia Periode 1949-2017. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/elmal.v1i1.277>
- Lusiana, D., & Soebagiyo, D. (2023). Determinan Defisit Anggaran di Indonesia Tahun 1998- 2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 175–185. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7939498>
- Nurlia, Suar, A., Bastian, A., & Santosa, T. A. (2023). Kajian Meta-Analisis: Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia.



Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(4), 4358–4366.
<https://doi.org/Retrievedfromhttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3995>

Oktaviana, A., Rafinda, A., & Rusmana, O. (2024). Analisis Pengaruh Utang Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2004-2023 Berdasarkan Data LKPP. *AKUNTANSI* 45, 5(2), 958–972.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3439>

Pertiwi, I. P., Camalia, N. D., Rega, R., & Kartiasih, F. (2023). Mencermati Pengaruh Utang dan Variabel Makroekonomi terhadap Sustainability Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 185–193.

Raysharie, P. I., Alviandi, R., Marbun, E. T. N., Sirait, L. R. A., Azzahra, N., Mawardani, R., & Aulia, S. (2024). Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Studi dalam Konteks Ekonomi Makro. *Research Accounting and Auditing Jurnal*, 1(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jekp.v1i1.4479>

Riblier, V. (2023). The Fiscal Cost of Public Debt and Government Spending Shocks. *Review*, 1–48.

Siswajanthy, F., Shiva, K. A., Salsabila, N., Putry, S. A. S., & Putri, S. M. I. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4360–4369.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13056>

Syafi'i, I., Syakur, F. A., & Wibowo, M. G. (2021). Pengaruh Utang Luar Negeri, Inflasi, dan Pendapatan Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi di 6 Negara Asean. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 36–43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2672>

Turmudi, I. (2019). Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam. *An-Nawa*, 1(2), 74–90.

Wijayanti, A. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 48–58.

Zahirah, S. N., Syafri Mandai, & Lavlimatria Esya. (2023). Pola Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Mendukung Ketahanan Fundamental Perekonomian Indonesia Pada Tahun 2015 - 2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 831–842. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15361>